

Penguatan Distribusi Pangan untuk Menjaga Stabilitas Harga dalam Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Sungai Penuh

Andi Candra Pajarianto ✉

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh

Abstrak

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga inflasi daerah dan daya beli masyarakat. Kota Sungai Penuh sebagai wilayah yang sebagian kebutuhannya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah menghadapi tantangan dalam mewujudkan sistem distribusi pangan yang efisien, stabil, dan terjangkau. Ketidاكلancaran distribusi pangan dapat memicu fluktuasi harga komoditas pangan yang pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi. Beberapa indikator ketahanan pangan daerah menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pangan di Kota Sungai Penuh, antara lain perkembangan Indeks Ketahanan Pangan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, serta kondisi kerentanan pangan wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aspek akses dan stabilitas pangan masih perlu diperkuat. Dalam konteks tersebut, sistem distribusi pangan memegang peran penting dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Policy paper ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi daerah di Kota Sungai Penuh. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data dokumen perencanaan daerah, capaian kinerja pembangunan, serta berbagai indikator ketahanan pangan seperti Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Prevalensi ketidakcukupan konsumsi Pangan (Pou), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Persentase Stabilitas Harga Komoditi Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama dalam distribusi pangan di Kota Sungai Penuh meliputi ketergantungan pasokan dari luar daerah, keterbatasan cadangan pangan pemerintah daerah, belum optimalnya koordinasi distribusi pangan, serta keterbatasan informasi pasar.

Kata Kunci: Stabilitas harga pangan; Distribusi pangan; Ketahanan pangan

Copyright (c) 2026 Andi Candra Pajarianto

✉ Corresponding author :

Email Address : andicandrapajarianto@gmail.com

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan beraktivitas produktif. Pangan berkualitas mendukung perkembangan teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan negara. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, yaitu tercukupinya pangan yang aman, bergizi, terjangkau, dan sesuai budaya, hingga tingkat individu. Keterjangkauan pangan, terutama di wilayah dengan masalah distribusi dan fluktuasi harga, menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.

Kota Sungai Penuh, yang terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dengan aksesibilitas terbatas, menghadapi tantangan distribusi pangan meski menjadi sentra produksi padi. Banyak komoditas strategis, seperti daging, telur, bawang, dan cabai merah, masih bergantung pasokan dari daerah lain. Kendala distribusi ini memengaruhi

stabilitas harga pangan dan berpotensi mendorong inflasi daerah, sehingga penguatan sistem distribusi menjadi kunci untuk menjaga harga dan ketahanan pangan.

Permasalahan distribusi dan akses pangan di Kota Sungai Penuh tercermin dari beberapa indikator ketahanan pangan. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 sebesar 83,19 turun dari 87,06 pada 2024 dan belum mencapai target RPJMD 87,21, menunjukkan distribusi pangan sebagai faktor utama yang memengaruhi IKP. Status waspada pada Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) dari 14,91% (2023) menjadi 15,75% (2024) menegaskan bahwa distribusi pangan memengaruhi ketersediaan dan konsumsi pangan. Meskipun stabilitas harga komoditas pangan tercatat CV = 12,49% melampaui target RPJMD (<30%), efisiensi distribusi masih dibutuhkan untuk menjaga harga tetap stabil dan akses pangan merata. Selain itu, analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) menunjukkan masih ada tiga desa yang rentan, mempertegas bahwa distribusi pangan belum merata dan beberapa wilayah tetap rawan kekurangan pangan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Pembentukan Tim Satgas Pangan, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) .

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam sistem distribusi pangan di Kota Sungai Penuh, seperti keterbatasan cadangan pangan, distribusi yang belum efisien, serta keterbatasan data dan informasi pasar.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan analisis kebijakan untuk memperkuat sistem distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketahanan Pangan di Kota Sungai Penuh

Ketahanan pangan di Kota Sungai Penuh menunjukkan tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait distribusi pangan dan stabilitas harga. Berdasarkan indikator ketahanan pangan, capaian dan target tahun 2022–2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Data capaian dan target indikator Ketahanan Pangan, Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan Kota Sungai Penuh Tahun 2022 - 2025

| Tahun | IKP (Capaian) | IKP (Target) | PoU (%) (Capaian) | PoU (%) (Target) | CPPD (Ton, Capaian) | CPPD (Ton, Target) |
|-------|---------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 2022 | 59,92 | 70,4 | 14,21 | - | 2 | 8 |
| 2023 | 83,14 | 70,45 | 15,75 | - | 5 | 16 |
| 2024 | 87,06 | 70,5 | 14,55 | - | 31,4 | 24 |
| 2025 | 83,19 | 70,55 | 12,81 | 14,55 | 32,4 | 32 |

Berdasarkan indikator ketahanan pangan Kota Sungai Penuh 2022–2025, tren capaian menunjukkan adanya tantangan distribusi pangan meskipun beberapa indikator

mencapai target RPJMD. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) meningkat dari 59,92 (2022) menjadi 87,06 (2024), kemudian menurun menjadi 83,19 (2025), menandakan tekanan pada ketersediaan pangan akibat distribusi yang belum optimal dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) menurun dari 15,75% (2023) menjadi 12,81% (2025), menunjukkan perbaikan keterjangkauan, namun wilayah rentan masih bergantung pada kelancaran distribusi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) meningkat signifikan dari 2 ton (2022) menjadi 32,4 ton (2025), memperkuat kemampuan menghadapi gangguan pasokan, tetapi distribusi dan alokasi cadangan tetap menjadi potensi masalah jika logistik tidak berjalan lancar. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa distribusi pangan merupakan faktor kritis dalam mencapai ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Selain tiga indikator yang disajikan pada Tabel 3.1, terdapat dua indikator tambahan yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kondisi distribusi dan stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh, yaitu **Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)** dan **Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)**. Kedua peta ini memberikan gambaran spasial mengenai desa-desa yang rentan terhadap gangguan pasokan dan menunjukkan pentingnya kelancaran distribusi pangan untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga di tingkat lokal.

| No | Komoditas | Sumber Pasokan |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Daging | Kabupaten Kerinci, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung dan Provinsi Riau |
| 2 | Telur | Kabupaten Kerinci dan Provinsi Sumatera Barat |
| 3 | Cabe | Kabupaten Kerinci dan Provinsi Sumatera Barat |
| 4 | Bawang | Kabupaten Kerinci dan Provinsi Sumatera Barat |
| 5 | Kentang | Kabupaten Kerinci dan Provinsi Sumatera Barat |

Adanya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah menyebabkan harga pangan di pasar lokal cukup sensitif terhadap gangguan distribusi, seperti keterlambatan pasokan, peningkatan biaya transportasi, maupun gangguan produksi di daerah pemasok. Apabila terjadi gangguan pada salah satu tahapan distribusi tersebut, maka pasokan pangan di pasar dapat berkurang sehingga berpotensi memicu kenaikan harga.

Keterbatasan fasilitas logistik dan sistem penyimpanan juga dapat mempengaruhi efisiensi distribusi pangan. Komoditas pangan, khususnya produk hortikultura yang memiliki masa simpan relatif singkat, memerlukan distribusi yang cepat dan efisien agar kualitas produk tetap terjaga. Apabila distribusi tidak berjalan secara optimal, maka risiko kerusakan produk akan meningkat dan berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar.

Dengan demikian, sistem distribusi pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh. Rantai distribusi yang panjang, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta keterbatasan infrastruktur logistik menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi distribusi dan pada akhirnya berdampak terhadap harga pangan di tingkat konsumen. Oleh karena itu, penguatan sistem distribusi pangan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

Stabilitas harga dan Inflasi

Stabilitas harga pangan merupakan faktor kunci dalam menjaga inflasi daerah dan daya beli masyarakat. Fluktuasi harga dapat terjadi akibat gangguan distribusi, keterbatasan cadangan pangan, atau perubahan permintaan dan pasokan. Kondisi ini menjadi sangat

relevan bagi Kota Sungai Penuh, mengingat sebagian komoditas strategis masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Berikut disajikan data Persentase Stabilitas Harga Pangan (CV Harga) untuk periode 2022-2025:

2. Data Persentase Stabilitas Harga Pangan (CV Harga) Tahun 2022 s/d 2025

| Tahun | CV Harga (%) | Target RPJMD (%) |
|-------|--------------|------------------|
| 2022 | 9,37 | <30 |
| 2023 | 10,35 | <30 |
| 2024 | 9,46 | <30 |
| 2025 | 12,49 | <30 |

Dari tabel terlihat bahwa harga pangan relatif stabil dibanding target RPJMD, namun kenaikan CV Harga pada 2025 menjadi 12,49% menunjukkan adanya tekanan distribusi, terutama pada komoditas strategis yang pasokannya berasal dari luar daerah. Fluktuasi harga umumnya terjadi pada momen tertentu, seperti Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), akibat lonjakan permintaan. Indikator lain, seperti Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang menurun dari 87,06 pada 2024 menjadi 83,19 pada 2025, dan PoU 12,81%, menunjukkan bahwa gangguan distribusi dan fluktuasi harga tetap memengaruhi keterjangkauan pangan bagi sebagian masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menjadi instrumen penting untuk menekan fluktuasi harga. Dengan peningkatan dari 2 ton pada 2022 menjadi 32,4 ton pada 2025, pemerintah daerah mampu melakukan intervensi saat gangguan distribusi terjadi sehingga dampak terhadap harga dapat dikurangi. Meski demikian, kapasitas CPPD masih terbatas untuk menghadapi gangguan pasokan jangka panjang, sehingga stabilitas harga tetap rentan terhadap gangguan eksternal dan keterlambatan pasokan dari luar daerah.

Inflasi pangan di Kota Sungai Penuh selalu menjadi perhatian utama, mengingat komoditas pangan merupakan pengeluaran pokok rumah tangga. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara aktif menekan inflasi melalui operasi pasar, penguatan cadangan pangan, dan koordinasi distribusi. Meskipun upaya TPID berhasil menjaga inflasi relatif terkendali, kota tetap harus waspada terhadap tekanan harga, terutama selama HBKN atau saat gangguan distribusi terjadi. Oleh karena itu, penguatan distribusi pangan, manajemen cadangan, dan koordinasi antar-daerah tetap menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, menekan volatilitas pangan, dan mendukung daya beli masyarakat.

Analisis Struktur Pelaku Usaha dalam Rantai Pasok Pangan

Struktur pelaku usaha pangan merupakan komponen penting dalam rantai pasok di Kota Sungai Penuh karena menentukan kelancaran produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Sistem pasokan didukung oleh berbagai pelaku usaha, mulai dari petani hortikultura skala kecil, penggilingan padi (RMU), hingga pelaku usaha pengolahan dan perdagangan pangan.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025, terdapat sekitar 86 unit pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan 90 unit penggilingan padi. Sebagian besar petani hortikultura memiliki lahan kurang dari 1 hektare dan memproduksi sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, cabai, dan tomat untuk pasar lokal. Beberapa kelompok tani cabai memiliki kapasitas 2.000-5.000 kg per panen, dengan sebagian hasil dipasarkan ke Sumatera Barat, menunjukkan peran komoditas hortikultura dalam perdagangan antar-

daerah. Unit penggilingan padi tersebar di beberapa kecamatan, memudahkan pengolahan gabah menjadi beras dan mendukung distribusi lokal.

Secara umum, rantai pasok pangan masih didominasi usaha skala kecil dengan kapasitas terbatas, sehingga relatif rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi, terutama pada komoditas hortikultura yang dipengaruhi faktor musim. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaku usaha dan efisiensi distribusi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Berikut disajikan Data Gambaran Umum Pelaku Usaha Segar Asal Tumbuhan dan Pengusaha Penggilingan Padi di Kota Sungai Penuh yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Tahun 2025.

Tabel 3

Data Gambaran Umum Pelaku Usaha dalam Rantai Pasok Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Tahun 2025

| N o | Jenis Pela ku Usah a | Juml ah Uni t | Kapasitas / Skala Produksi | Wilayah Pemasaran | Keterangan |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Petani hortikultura (bayam, kangkung, sawi, dll) | ±50 orang | Lahan 0,02-0,50 ha | Kota Sungai Penuh | Pemasok pasar local |
| 2 | Petani cabai / kelompok cabai | ±12 unit | 2.000-5.000 kg/panen | Sungai Penuh & Sumatera Barat | Komoditas strategis |
| 3 | Petani komoditas pangan lain (ubi, jagung, kacang, dll) | ±15 orang | Lahan 0,5 - 1,5 ha | Kota Sungai Penuh | Mendukung diversifikasi pangan |
| 4 | Pengolahan kopi | 3 unit usaha | 200 kg - 6 ton/bulan | Jawa dan Sumatera | Produk kemasan |
| 5 | RMU beras kemasan | 2 unit usaha | Hingga 25 ton | Jambi & Sumatera Barat | Pengolahan beras skala menengah |
| 6 | Penggilingan padi (RMU) | 90 unit | ±1 ton/jam | Kota Sungai Penuh | Infrastruktur pengolahan beras |
| 7 | Ritel sembako / PSAT | 2 unit usaha | Skala toko | Sungai Penuh & Kerinci | Penjualan offline dan online |
| 8 | Gudang komoditas (kulit manis) | 1 unit | ±50 ton | Jakarta | Tenaga kerja ±37 orang |

Meskipun harga pangan secara umum relatif stabil, sistem distribusi pangan di Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efisiensi distribusi. Rantai distribusi yang relatif panjang menyebabkan adanya tambahan biaya pada setiap tahapan perdagangan, seperti biaya transportasi, penyimpanan, dan margin pedagang. Kondisi ini dapat meningkatkan harga komoditas pangan di tingkat konsumen.

Selain itu, keterbatasan fasilitas logistik dan sistem penyimpanan pangan juga mempengaruhi kelancaran distribusi, khususnya untuk komoditas hortikultura yang memiliki masa simpan relatif pendek. Apabila distribusi tidak berjalan secara cepat dan efisien, maka risiko kerusakan produk dapat meningkat sehingga pasokan pangan di pasar menjadi berkurang.

Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah

Meskipun Kota Sungai Penuh merupakan sentra produksi padi, sebagian besar komoditas strategis seperti daging, telur, bawang, dan cabai masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Ketergantungan ini meningkatkan risiko gangguan pasokan akibat keterlambatan transportasi, cuaca ekstrem, atau fluktuasi harga di daerah asal. Hal ini tercermin dari penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 87,06 pada 2024 menjadi 83,19 pada 2025, yang menunjukkan tekanan pada distribusi pangan dan ketersediaan pangan lokal.

Cadangan pangan pemerintah daerah yang terbatas

Meskipun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) meningkat signifikan dari 2 ton pada tahun 2022 menjadi 32,4 ton pada tahun 2025 dan telah memenuhi target, kapasitas ini masih relatif terbatas untuk menghadapi gangguan distribusi atau fluktuasi harga dalam skala yang lebih besar.

Distribusi pangan yang belum optimal

Koefisien variasi harga (CV Harga) pangan di Kota Sungai Penuh relatif stabil (9-12%), tetapi beberapa komoditas strategis masih mengalami fluktuasi harga. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pangan belum efisien dan merata, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Gangguan distribusi dapat memperburuk keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya di desa rentan pangan (3 desa atau 4,35% dari total desa) berdasarkan FSVA, meskipun secara komposit sebagian besar wilayah tergolong tahan pangan.

Keterbatasan data dan informasi pasar

Sistem informasi distribusi dan harga pangan yang belum optimal membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk memantau pergerakan komoditas secara real-time. Akibatnya, respons terhadap kenaikan harga atau gangguan distribusi cenderung lambat, serta koordinasi antar pelaku usaha dan pemerintah menjadi kurang efektif. Hal ini juga tercermin pada PoU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) yang masih mencapai 12,81% pada 2025, menunjukkan sebagian masyarakat masih rentan terhadap keterbatasan pangan akibat distribusi yang belum merata.

Koordinasi antar wilayah dan pemangku kepentingan yang belum optimal Distribusi pangan di Kota Sungai Penuh saat ini lebih bersifat internal, dengan kerja sama antar daerah (KAD) belum dijalankan. Padahal, koordinasi lintas wilayah dapat menjadi mekanisme penting untuk menstabilkan pasokan pangan strategis dan harga di daerah yang memiliki keterbatasan produksi lokal. Ketidakefektifan koordinasi ini menjadi salah satu penyebab fluktuasi harga dan potensi ketidacukupan pangan di wilayah rentan.

Kebijakan Intervensi yang Telah dilaksanakan

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai kebijakan dan intervensi untuk mendukung ketahanan pangan daerah serta menjaga stabilitas harga pangan. Upaya ini meliputi stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), pemantauan harga secara berkala, serta pembinaan terhadap pelaku usaha pangan lokal. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pangan, meningkatkan keterjangkauan harga, dan meminimalkan dampak fluktuasi harga pangan terhadap masyarakat.

Salah satu intervensi utama adalah Gerakan Pangan Murah (GPM), yang bertujuan menyediakan bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama saat lonjakan permintaan seperti Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) maupun peringatan hari besar daerah. Intervensi ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga lebih stabil, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk menekan potensi kenaikan harga di pasar. Sepanjang tahun 2025, kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan pada beberapa kesempatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kota Sungai Penuh Tahun 2025

| No | Tanggal | Lokasi | Keterangan |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 13 Maret 2025 | Halaman Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh | GPM Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H |
| 2 | 30–31 Agustus 2025 | Halaman Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh (30 Agustus 2025); Pasar Rakyat Desa Larik Kemahan Kec. Hampanan Rawang dan Pasar Rakyat Desa Ulu Air Kec. Kumun Debai (31 Agustus 2025) | GPM Serentak Seluruh Indonesia Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025 |
| 3 | 3–7 November 2025 | Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh | GPM Dalam Rangka HUT Kota Sungai Penuh ke-17 Tahun 2025 |
| 4 | 5–6 Desember 2025 | Halaman Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh | GPM Dalam Rangka Menyambut Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 |

Selain GPM, CPPD menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Data 2022–2025 menunjukkan peningkatan signifikan dari 2 ton menjadi 32,4 ton, memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk merespons gangguan distribusi maupun fluktuasi harga. Meskipun demikian, kapasitas CPPD masih terbatas untuk menghadapi tekanan pasokan jangka panjang, sehingga risiko volatilitas harga tetap ada, terutama pada komoditas yang bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Pemantauan harga pangan secara rutin di pasar tradisional dan pusat perdagangan mendukung deteksi dini potensi kenaikan harga dan menjadi dasar kebijakan intervensi, termasuk pelaksanaan GPM dan koordinasi distribusi. Selain itu, pembinaan pelaku usaha pangan lokal – termasuk penggilingan padi yang tergabung dalam PERPADI – meningkatkan peran sektor usaha dalam menjaga ketersediaan dan distribusi beras di tingkat lokal. Namun, penguatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan masih belum optimal.

Mengingat keterbatasan produksi beberapa komoditas strategis, koordinasi antar daerah dan pengembangan sistem logistik pangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat distribusi, menjaga stabilitas harga, serta mendukung ketahanan pangan lokal.

Berdasarkan analisis kondisi ketahanan pangan, distribusi pangan, stabilitas harga, serta struktur pelaku usaha pangan di Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan bahwa sistem pangan daerah secara umum berada pada kondisi relatif baik, namun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan.

Dari sisi ketahanan pangan, capaian **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** Kota Sungai Penuh menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berada di atas target RPJMD pada tahun 2025. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) juga menunjukkan tren perbaikan. Hasil analisis **Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)** menunjukkan bahwa sebagian besar desa tergolong tahan pangan, meskipun masih terdapat beberapa desa yang berada pada kategori rentan pangan. Di sisi lain, **Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)** menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kota Sungai Penuh berada pada status waspada untuk aspek ketersediaan pangan, yang mengindikasikan adanya potensi kerentanan apabila terjadi gangguan pasokan atau distribusi pangan.

Permasalahan utama dalam sistem pangan daerah berkaitan dengan **ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah**, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang, telur, dan daging. Ketergantungan ini menyebabkan sistem pasokan pangan menjadi rentan terhadap gangguan distribusi, perubahan harga di daerah pemasok, maupun kendala transportasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas harga pangan di tingkat lokal.

Dari sisi stabilitas harga, nilai **koefisien variasi harga pangan (CV Harga)** masih berada dalam batas target RPJMD, yang menunjukkan bahwa secara umum harga pangan relatif stabil. Namun demikian, fluktuasi harga masih terjadi pada beberapa komoditas strategis yang pasokannya berasal dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh masih sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.

Selain itu, struktur pelaku usaha pangan di Kota Sungai Penuh masih didominasi oleh **usaha skala kecil dengan kapasitas produksi terbatas**, sehingga kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri masih relatif terbatas. Kondisi ini diperkuat oleh belum optimalnya **kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan strategis**, yang seharusnya dapat menjadi mekanisme penting dalam memperkuat rantai pasok pangan regional.

Berdasarkan kondisi tersebut, tantangan utama sistem pangan di Kota Sungai Penuh tidak hanya terletak pada aspek produksi, tetapi juga pada **efisiensi sistem distribusi pangan, penguatan cadangan pangan daerah, pengembangan kerja sama antar daerah, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan lokal**. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi untuk memperkuat sistem distribusi pangan daerah guna menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, serta mendukung pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang memerlukan perhatian dalam perumusan kebijakan, yaitu:

1. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, terutama pada komoditas strategis seperti cabai, bawang, telur, dan daging.
2. Sistem distribusi pangan yang belum optimal, termasuk keterbatasan sistem informasi pasar dan koordinasi antar pelaku usaha serta pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan

strategis.

Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem distribusi pangan, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kota Sungai Penuh.

Arah Kebijakan Penguatan Distribusi Pangan

Berdasarkan hasil analisis kondisi ketahanan pangan, stabilitas harga pangan, serta sistem distribusi pangan di Kota Sungai Penuh, penguatan distribusi pangan menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan serta mendukung pengendalian inflasi daerah.

Meskipun secara umum indikator ketahanan pangan menunjukkan kondisi yang relatif baik, sistem distribusi pangan daerah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, keterbatasan cadangan pangan pemerintah daerah, distribusi pangan yang belum efisien, serta belum optimalnya kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan komoditas pangan strategis.

Oleh karena itu, arah kebijakan penguatan distribusi pangan di Kota Sungai Penuh perlu difokuskan pada upaya meningkatkan efisiensi sistem distribusi pangan, memperkuat cadangan pangan daerah, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengembangkan kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis.

Dengan penguatan sistem distribusi pangan yang lebih terintegrasi, diharapkan stabilitas harga pangan dapat lebih terjaga sehingga mampu mendukung pengendalian inflasi daerah serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kota Sungai Penuh

Strategi Penguatan Distribusi Pangan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, terdapat beberapa strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memperkuat sistem distribusi pangan daerah.

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada saat terjadi gangguan distribusi atau peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pengelolaan cadangan pangan daerah melalui peningkatan volume cadangan pangan, perbaikan sistem pengelolaan cadangan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan cadangan pangan dalam kegiatan stabilisasi harga.

Selain itu, penguatan cadangan pangan juga perlu didukung dengan sistem distribusi cadangan pangan yang lebih cepat dan tepat sasaran, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi kerentanan pangan berdasarkan analisis FSVA dan SKPG.

Optimalisasi Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Kegiatan ini terbukti dapat membantu menekan kenaikan harga pangan pada periode tertentu, seperti menjelang hari besar keagamaan dan pada saat terjadi gangguan distribusi.

Ke depan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah perlu dioptimalkan melalui peningkatan frekuensi kegiatan, perluasan lokasi pelaksanaan, serta penguatan kerja sama dengan pelaku usaha pangan dan distributor untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Penguatan koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Pangan dalam memantau perkembangan harga pangan, mengidentifikasi potensi gangguan distribusi, serta merumuskan langkah-langkah intervensi yang diperlukan secara cepat dan terkoordinasi.

Koordinasi ini juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha pangan, distributor, pengelola pasar, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran distribusi pangan di wilayah Kota Sungai Penuh.

Pengembangan Sistem Informasi Distribusi dan Harga Pangan

Ketersediaan data dan informasi pasar yang akurat dan terkini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan terkait stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi distribusi dan harga pangan yang mampu memantau pergerakan harga serta arus distribusi komoditas pangan strategis secara lebih cepat dan akurat.

Sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi kenaikan harga lebih dini sehingga pemerintah daerah dapat segera melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Penguatan Kerja Sama Antar Daerah dalam Distribusi Pangan

Mengingat sebagian komoditas pangan strategis di Kota Sungai Penuh masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, kerja sama antar daerah menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga kelancaran pasokan pangan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat mengembangkan kerja sama dengan daerah produsen pangan, seperti Kabupaten Kerinci dan daerah lain di wilayah Sumatera Barat maupun Provinsi Jambi, untuk menjamin pasokan komoditas pangan strategis secara berkelanjutan. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama antar daerah (KAD) yang mencakup kesepakatan distribusi komoditas pangan, penguatan rantai pasok regional, serta koordinasi stabilisasi harga pangan antar wilayah.

Penguatan Sistem Logistik dan Pusat Distribusi Pangan Daerah

Selain penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem logistik pangan yang lebih efisien melalui penguatan pusat distribusi pangan daerah. Pusat distribusi ini dapat berfungsi sebagai titik pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran komoditas pangan strategis sebelum didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Sungai Penuh.

Keberadaan pusat distribusi pangan daerah dapat membantu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, serta mengurangi biaya distribusi yang pada akhirnya dapat membantu menekan harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu, pusat distribusi pangan juga dapat menjadi bagian dari sistem pemantauan stok pangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi kekurangan pasokan secara lebih dini.

Prioritas Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan penguatan distribusi pangan, pemerintah daerah perlu menetapkan beberapa prioritas implementasi kebijakan, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program stabilisasi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah.
3. Memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan dalam pemantauan distribusi dan harga pangan.
4. Mengembangkan sistem informasi distribusi dan harga pangan berbasis data yang terintegrasi.
5. Mendorong pengembangan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan komoditas pangan strategis.

Pelaksanaan berbagai strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem distribusi pangan, menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, serta mendukung pengendalian inflasi daerah di Kota Sungai Penuh.

Pelaksanaan berbagai strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem distribusi pangan, menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, serta mendukung pengendalian inflasi daerah di Kota Sungai Penuh.

Rencana Implementasi Kebijakan

Agar strategi penguatan distribusi pangan dapat berjalan secara efektif, diperlukan langkah implementasi yang terencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, serta lembaga terkait dalam sistem distribusi pangan.

Dalam jangka pendek, pemerintah daerah dapat memprioritaskan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), peningkatan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta penguatan pemantauan harga pangan melalui Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) dan Satuan Tugas Pangan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi dalam waktu dekat.

Dalam jangka menengah, pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi distribusi dan harga pangan yang terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan pemantauan pasokan dan pergerakan harga komoditas pangan strategis. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mendorong pengembangan kerja sama antar daerah dengan wilayah produsen pangan guna menjamin kelancaran pasokan komoditas strategis.

Dalam jangka panjang, penguatan sistem logistik dan pusat distribusi pangan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan serta memperpendek jalur distribusi. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, diharapkan stabilitas harga pangan dapat lebih terjaga serta mendukung pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Distribusi pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi daerah. Berdasarkan hasil analisis dalam policy paper ini, kondisi ketahanan pangan di Kota Sungai Penuh secara umum berada pada kategori relatif baik. Namun demikian, sistem pangan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya yang berkaitan dengan sistem distribusi pangan. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, efisiensi distribusi yang belum optimal, serta keterbatasan sistem informasi pasar menjadi faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan di tingkat lokal.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa meskipun stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh masih berada dalam batas target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, fluktuasi harga pada beberapa komoditas strategis tetap terjadi. Kondisi tersebut

berkaitan erat dengan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan dari daerah pemasok. Oleh karena itu, penguatan sistem distribusi pangan menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, policy paper ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan yang meliputi penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), optimalisasi kegiatan stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satuan Tugas Pangan, pengembangan sistem informasi distribusi dan harga pangan, serta penguatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan komoditas pangan strategis. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem distribusi pangan, menjaga stabilitas harga komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan. Dengan penguatan sistem distribusi pangan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika pasokan dan harga, diharapkan stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh dapat lebih terjaga sehingga mampu mendukung pengendalian inflasi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Penguatan sistem distribusi pangan merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi daerah. Bagi wilayah seperti Kota Sungai Penuh yang masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, efisiensi distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Melalui penguatan cadangan pangan daerah, peningkatan koordinasi pengendalian inflasi, pengembangan sistem informasi harga pangan, serta penguatan kerja sama antar

daerah, diharapkan sistem distribusi pangan di Kota Sungai Penuh dapat menjadi lebih efisien dan responsif terhadap berbagai potensi gangguan pasokan. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Referensi :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 - 2026
- Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 Badan Pangan Nasional
- Buku Saku Prevalance Of Undernourishment (Pou) Tahun 2023, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional
- LKjIP dinas Ketahanan Pangan Kota ungai Penuh Tahun 2024
- Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 Badan Pangan Nasional
- RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2029
- Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2025 - 2029
- LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Tahun 2025
- Laporan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Sungai Penuh Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh
- Laporan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Sungai Penuh Bulan Desember Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh